

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) oleh Tim Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, yang dianalisis berdasarkan enam dimensi implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR)

Implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis secara umum telah berjalan cukup baik, tetapi belum sepenuhnya optimal. Pelaksanaan program telah didukung oleh kejelasan tujuan dan sasaran, ketersediaan sumber daya, pembagian tugas antar pelaksana, komunikasi dan koordinasi, disposisi pelaksana yang positif, serta dukungan pemerintah desa dan masyarakat. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa partisipasi keluarga yang belum konsisten, keterbatasan sumber daya, keterbatasan waktu keluarga, serta belum optimalnya penerjemahan target operasional program kepada keluarga sasaran.

2. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran Program BKR telah dipahami oleh Tim BKKBN, PLKB, kader, dan keluarga sasaran. Tujuan program telah diterapkan melalui

kegiatan penyuluhan dan pembinaan keluarga yang memiliki anak remaja. Namun, masih terdapat kesenjangan antara pemahaman pelaksana mengenai target operasional program dengan pemahaman keluarga sasaran. Keluarga lebih memahami manfaat BKR daripada target dan indikator pelaksanaannya. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab partisipasi keluarga belum konsisten.

3. Sumber Daya

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan BKR telah tersedia melalui Tim BKKBN, PLKB, dan kader. Sarana dan prasarana dasar juga tersedia dan dapat dimanfaatkan dalam kegiatan. Namun, sumber daya yang ada belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan anggaran, fasilitas pendukung, waktu pelaksana, serta kebutuhan penguatan kapasitas kader. Keterbatasan tersebut diatasi dengan mengoptimalkan fasilitas desa atau masyarakat dan meningkatkan peran kader dalam menjangkau keluarga sasaran.

4. Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik badan pelaksana cukup mendukung implementasi BKR. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembagian tugas antara Tim BKKBN, PLKB, kader, pemerintah desa, dan keluarga sasaran. PLKB menangani persoalan teknis di lapangan, sedangkan kader menjadi penghubung antara pelaksana dengan keluarga. Permasalahan yang membutuhkan keputusan lebih lanjut dikoordinasikan kepada pihak yang memiliki kewenangan. Namun, kapasitas dan konsistensi keterlibatan kader masih perlu diperkuat.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan BKR telah berjalan melalui pola berjenjang, yaitu dari Tim BKKBN kepada PLKB, kader, kemudian keluarga sasaran. Kegiatan pelaksana meliputi sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, koordinasi, monitoring, serta pencatatan dan pelaporan. Kader berperan penting dalam menyampaikan informasi kepada keluarga. Namun, komunikasi masih perlu diperkuat agar tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mampu meningkatkan partisipasi keluarga secara berkelanjutan.

6. Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana menjadi salah satu faktor pendukung implementasi BKR. Pelaksana menunjukkan pemahaman terhadap tujuan program, sikap terbuka, responsif terhadap permasalahan keluarga, serta komitmen dalam melaksanakan pembinaan. Pendekatan yang tidak menghakimi juga membuat keluarga lebih nyaman menyampaikan permasalahan. Kondisi tersebut membantu pelaksanaan BKR tetap berjalan meskipun terdapat berbagai keterbatasan.

7. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan sosial dan kelembagaan cukup mendukung pelaksanaan BKR. Masyarakat pada dasarnya menerima dan memahami manfaat program. Namun, kondisi ekonomi keluarga, terutama pekerjaan dan kesibukan, menjadi hambatan terhadap kehadiran peserta. Dukungan pemerintah desa, PLKB, kader, dan pihak terkait menjadi faktor yang membantu keberlangsungan program. Dengan demikian, rendahnya konsistensi kehadiran keluarga lebih disebabkan keterbatasan waktu dan kesempatan daripada penolakan terhadap program.

8. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung implementasi BKR meliputi kejelasan tujuan program, keterlibatan Tim BKKBN, PLKB, dan kader, pembagian tugas yang jelas, komunikasi dan koordinasi, disposisi pelaksana yang positif, keterlibatan masyarakat melalui kader, serta dukungan pemerintah desa. Sementara itu, faktor penghambat meliputi partisipasi keluarga yang belum konsisten, keterbatasan waktu keluarga, keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang belum ideal, perbedaan kondisi keluarga dan remaja, keterbatasan jangkauan pelaksana, serta belum optimalnya konsistensi keterlibatan kader.

9. Upaya Mengatasi Hambatan

Tim BKKBN mengatasi hambatan implementasi melalui strategi yang adaptif dan kolaboratif. Upaya tersebut dilakukan dengan menerjemahkan tujuan program secara lebih operasional, mengoptimalkan sumber daya, memperkuat pembagian tugas, menggunakan komunikasi berjenjang, meningkatkan responsivitas pelaksana, memperkuat peran kader, menyesuaikan kegiatan dengan kondisi keluarga, serta meningkatkan dukungan pemerintah desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa hambatan implementasi BKR tidak dapat diatasi melalui satu strategi saja, tetapi membutuhkan keterpaduan berbagai aspek implementasi.

10. Temuan/Kebaruan Penelitian

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa persoalan implementasi BKR di Kecamatan Kawali bukan terletak pada tidak berjalannya program atau penolakan masyarakat, tetapi pada kemampuan program dalam mempertahankan partisipasi keluarga secara konsisten. Terdapat kesenjangan antara pemahaman target operasional oleh pelaksana dengan pemahaman keluarga sasaran. Selain itu,

kader memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara pelaksana dengan keluarga, sedangkan dukungan pemerintah desa menjadi faktor kelembagaan yang memperkuat keberlangsungan program. Kebaruan lainnya menunjukkan bahwa penyelesaian hambatan BKR dilakukan secara multidimensional melalui keterkaitan antara sumber daya, komunikasi, kader, disposisi pelaksana, dan kondisi lingkungan keluarga.

Dalam implementasi Program BKR di Kecamatan Kawali meliputi kejelasan tujuan dan sasaran, pembagian tugas pelaksana, komunikasi dan koordinasi, sikap serta komitmen pelaksana, serta dukungan pemerintah desa dan masyarakat sudah cukup optimal. Sedangkan pemahaman keluarga terhadap target operasional, keterbatasan anggaran dan sarana pendukung, kapasitas dan konsistensi kader, konsistensi komunikasi dalam mendorong partisipasi, serta kehadiran keluarga yang dipengaruhi oleh pekerjaan, waktu, dan kondisi sosial ekonomi belum sepenuhnya optimal

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Tim BKKBN dan PLKB

Tim BKKBN dan PLKB Kecamatan Kawali perlu meningkatkan penyampaian tujuan dan target operasional Program BKR kepada keluarga sasaran secara sederhana dan mudah dipahami. Penyampaian informasi tidak hanya berfokus pada jadwal dan materi kegiatan, tetapi juga menjelaskan pentingnya partisipasi keluarga secara berkelanjutan.

2. Penyesuaian waktu dan metode kegiatan

Pelaksanaan kegiatan BKR perlu disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi keluarga, khususnya waktu kerja dan aktivitas keluarga. Penyesuaian jadwal dan metode pembinaan diperlukan agar keluarga yang memiliki keterbatasan waktu tetap dapat memperoleh informasi dan pendampingan.

3. Penguatan kapasitas kader

Kapasitas dan konsistensi kader perlu ditingkatkan melalui pembinaan secara berkelanjutan. Kader perlu diperkuat dalam kemampuan menyampaikan informasi, melakukan pendekatan kepada keluarga, mengidentifikasi permasalahan, serta melakukan koordinasi dengan PLKB. Hal ini penting karena kader merupakan pihak yang paling dekat dengan keluarga sasaran.

4. Optimalisasi sumber daya

Tim BKKBN bersama pemerintah desa perlu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, termasuk fasilitas desa dan masyarakat. Keterbatasan anggaran dan sarana pendukung perlu diantisipasi melalui pemanfaatan sumber daya lokal agar kegiatan BKR dapat terus berjalan.

5. Penguatan komunikasi dan koordinasi

Komunikasi antara Tim BKKBN, PLKB, kader, pemerintah desa, dan keluarga sasaran perlu terus ditingkatkan. Komunikasi sebaiknya dilakukan secara dua arah sehingga pelaksana tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengetahui kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi keluarga.

6. Peningkatan dukungan pemerintah desa

Pemerintah desa perlu meningkatkan dukungan terhadap Program BKR melalui penyediaan fasilitas, dukungan koordinasi, penyebaran informasi, dan pelibatan masyarakat. Dukungan tersebut diperlukan untuk memperkuat keberlanjutan program di tingkat desa dan masyarakat.

7. Peningkatan monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara lebih menyeluruh, tidak hanya berdasarkan jumlah kegiatan dan kehadiran peserta, tetapi juga dengan melihat alasan ketidakhadiran keluarga, kebutuhan keluarga, serta perkembangan pelaksanaan pembinaan. Hasil monitoring dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki jadwal, metode, dan materi kegiatan.

8. Bagi keluarga sasaran

Keluarga yang memiliki anak remaja diharapkan meningkatkan keterlibatan dalam Program BKR karena program tersebut memberikan pengetahuan dan kemampuan dalam mendampingi, membina, berkomunikasi, dan mengawasi perkembangan remaja. Bagi keluarga yang tidak dapat hadir secara rutin, komunikasi dengan kader dan PLKB tetap perlu dilakukan agar tetap memperoleh informasi dan pendampingan.

9. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai Program BKR dengan mengkaji aspek yang belum menjadi fokus penelitian ini, seperti efektivitas pembinaan, perubahan pengetahuan dan kemampuan orang tua, pola komunikasi orang tua dengan remaja, serta dampak Program BKR terhadap keluarga dan remaja. Dengan demikian, penelitian

selanjutnya dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai hasil dan manfaat Program BKR.